

Pelayanan Publik Dalam Bayang-Bayang Tambang : Dilema Kebijakan Pariwisata Di Raja Ampat

Muhamad Khofa Nurzaman¹

¹Administrasi Publik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia

Keywords:

*Raja Ampat
 Social Conflict
 Nature Conservation*

Abstract: *This study discusses policy issues arising from the conflict between tourism and mining development in the Raja Ampat region, West Papua, with a primary focus on the impacts on the quality of public services, environmental sustainability, and the social and economic conditions of local communities. Raja Ampat is widely known as one of the areas with the richest marine biodiversity in the world and has developed into a leading marine tourism destination, which has made significant contributions to the local economy. However, in recent years, the expansion of nickel mining activities has created serious threats to the sustainability of the ecosystem, the sustainability of the tourism sector, and the welfare of indigenous peoples living in the area. Using a qualitative descriptive research method based on secondary data, this study found that the government's less transparent policies and the minimal involvement of indigenous peoples in the mining permit granting process have led to social conflicts and reduced the level of public trust in the government. On the other hand, the local government together with the local community firmly demanded that development priorities remain directed at sustainable tourism development. Various efforts have been made, including the revocation of problematic mining permits, strengthening coordination between related sectors, and plans to establish Raja Ampat as a Special Economic Zone (KEK) that focuses on green and environmentally friendly tourism, which is an important strategic step that must continue to be strengthened. The findings of this study confirm that transparent public services, involving broad community participation, and being fair are the main foundations that need to be maintained so that the future of Raja Ampat as a world natural heritage and a source of sustainable livelihood for its people can be guaranteed.*

Kata Kunci:

*Raja Ampat
 Konflik Sosial
 Pelestarian Alam*

Abstrak: *Penelitian ini membahas permasalahan kebijakan yang muncul akibat adanya konflik antara pembangunan sektor pariwisata dan pertambangan di wilayah Raja Ampat, Papua Barat, dengan fokus utama pada dampak yang ditimbulkan terhadap mutu layanan publik, kelestarian lingkungan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Raja Ampat dikenal secara luas sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang paling kaya di dunia dan telah berkembang menjadi destinasi wisata bahari yang unggul, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat*

setempat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perluasan aktivitas pertambangan nikel telah memunculkan ancaman serius terhadap kelangsungan ekosistem, keberlanjutan sektor pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat adat yang tinggal di kawasan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pada data sekunder, studi ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang kurang transparan serta minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pemberian izin pertambangan telah menimbulkan konflik sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, pemerintah daerah bersama dengan masyarakat lokal secara tegas menuntut agar prioritas pembangunan tetap diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pencabutan izin pertambangan yang bermasalah, penguatan koordinasi antar sektor terkait, serta rencana untuk menetapkan Raja Ampat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada pariwisata hijau dan ramah lingkungan, yang merupakan langkah strategis penting yang harus terus diperkuat. Temuan dari kajian ini menegaskan bahwa pelayanan publik yang bersifat transparan, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, dan berkeadilan merupakan fondasi utama yang perlu dijaga agar masa depan Raja Ampat sebagai warisan alam dunia dan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya dapat terjamin.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan keindahan alamnya, tak asing lagi bagi kita sebagai penduduk Indonesia mendengar fakta tersebut.

Hampir saja keindahan dan kekayaan alam tersebut lepas dari genggaman pribumi akibat penjajahan yang melanda secara bertahun-tahun, Namun atas dasar semangat juang yang dikobarkan oleh para pahlawan kita, negeri ini masih tetap berdiri kokoh dibawah naungan pribumi beserta seluruh keindahan yang ada didalamnya. Alih-alih para pahlawan berjuang keras melawan penjajah demi mempertahankan negeri ini, yang menjadi musuh terberat justru bangsanya sendiri. Hal tersebut merupakan kejadian yang ramai akhir-akhir ini, salah satu daerah di Papua yang dikenal dengan keindahan alamnya harus menjadi korban atas kebijakan sepihak dari pemerintah hari ini, yaitu Raja Ampat.

Raja Ampat sudah lama dikenal sebagai simbol pariwisata bahari Indonesia yang memiliki reputasi internasional. Wilayah ini memiliki ekosistem laut yang sangat kaya, menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 75% spesies karang di dunia serta lebih dari 1.500

jenis ikan. Keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah menjadikan sektor pariwisata sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kelangsungan hidup Raja Ampat menghadapi ancaman serius akibat pertumbuhan industri pertambangan, terutama pertambangan nikel. Beberapa perusahaan mulai menjalankan aktivitas penambangan di wilayah ini, khususnya di Pulau Gag dan daerah sekitarnya. Kehadiran kegiatan pertambangan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait dampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekosistem laut, dan keberlanjutan sektor pariwisata.

Kebijakan pemerintah menjadi faktor utama dalam mengatasi situasi ini. Di satu sisi, pemerintah mendorong investasi pertambangan sebagai bagian dari program hilirisasi nasional. Namun, di sisi lain, masyarakat sipil dan komunitas adat menuntut agar Raja Ampat tetap dijaga sebagai kawasan konservasi dan destinasi wisata utama. Kondisi ini menciptakan dilema kebijakan: bagaimana mengharmonisasikan kepentingan ekonomi nasional, pelestarian lingkungan, dan pelayanan publik yang adil bagi masyarakat lokal?. Pelayanan publik dalam konteks ini tidak hanya meliputi penyediaan infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga mencakup transparansi dalam pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan pertambangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah menunjukkan bahwa pelayanan publik di sektor ini masih belum maksimal.

Dilema ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai cara pemberian layanan publik ketika kebijakan pembangunan yang diterapkan saling bertentangan satu sama lain. Dalam pengertian yang luas, layanan publik meliputi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, penyediaan informasi yang terbuka dan transparan, keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berdampak pada kondisi lingkungan masyarakat.

Dapat kita ketahui bahwa hal tersebut bersebrangan dengan teori atau konsep dari "kehendak rakyat" (*The Will of the People*), kebaikan bersama, dan kebijakan publik digunakan di dalam teori ini untuk menjelaskan demokrasi. Seperti yang dijelaskan dalam konsep Leviathan oleh Thomas Hobbes, pemahaman tentang kedaulatan rakyat

muncul sebagai tanggapan terhadap pandangan yang memberikan kekuasaan absolut kepada negara, baik yang berlandaskan alasan sekuler maupun teokratis. Prinsip utama teori ini adalah bahwa warga negara harus menikmati kesetaraan politik untuk dapat mengontrol dan memerintah secara bergantian, terutama dalam konteks demokrasi Athena yang sedang berkembang. (Ahmad Sholikin, 2021).

Ketidakmampuan pemerintah dalam menyelaraskan antara kepentingan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan eksploitasi sumber daya alam menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem layanan publik yang berjalan. Saat izin pertambangan diberikan tanpa adanya proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, dampak lingkungan tidak dievaluasi secara menyeluruh, dan aspirasi masyarakat lokal diabaikan oleh pihak berwenang, maka layanan publik berubah menjadi alat kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan industri daripada kepentingan masyarakat.

Permasalahan ini tidak berdiri sendiri sebagai isu terpisah. Ia mencerminkan pola hubungan kekuasaan yang kompleks antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara negara dengan masyarakat adat, serta antara tujuan pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Raja Ampat kini menjadi contoh studi penting yang memperlihatkan bagaimana layanan publik diuji dalam menghadapi benturan antara dua model pembangunan yang berbeda, yaitu pariwisata yang berfokus pada konservasi dan pertambangan yang berorientasi pada ekstraksi sumber daya.

Tinjauan Literatur

1. Teori

1) Teori Pelayanan Publik

Teori ini menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dengan cara yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus Raja Ampat, mutu pelayanan publik bisa menurun jika pemerintah lebih memprioritaskan sektor tambang daripada pariwisata,

sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan kepada masyarakat berisiko diabaikan (Hood, 1991).

2) Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan mengharuskan kebutuhan masyarakat saat ini dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam perdebatan antara pertambangan dan pariwisata di Raja Ampat, teori ini menjadi dasar agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Brundtland Report, 1987).

3) Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Teori ini menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat, keterbukaan informasi, tanggung jawab, dan efektivitas dalam setiap proses pemerintahan. Ketegangan antara sektor tambang dan pariwisata sering kali menunjukkan kurang optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah (UNDP, Bank Dunia).

2. Penelitian Terdahulu

1) Ketegangan antara pariwisata dan pertambangan

Nasrun Katingka (2025) melaporkan bahwa setelah izin pertambangan dicabut di Pulau Manyafun dan Wayag, aktivitas pariwisata sempat berhenti sementara. Konflik antara masyarakat yang menggantungkan hidup pada pariwisata dengan para pekerja tambang memicu ketegangan yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola alih fungsi lahan dan memberikan dukungan kepada UMKM agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.

2) Ketidakkonsistenan tata kelola antar lembaga

Alfred Benediktus Jogoena (2025) mengungkapkan bahwa permasalahan utama adalah ketidaksesuaian antara regulasi pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terbukti dari masih diberikannya izin pertambangan kepada PT Gag Nickel, meskipun Mahkamah Agung telah melarang aktivitas tambang di pulau-pulau kecil, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat.

3) Dilema ekonomi antara pertambangan dan pariwisata

Surya Radhit (2025) menyatakan bahwa sektor pariwisata di Raja Ampat memberikan pemasukan signifikan, sekitar Rp700 miliar per tahun. Namun, izin pertambangan nikel yang mulai dikeluarkan sejak 2023 mengancam ekosistem laut dan citra ekowisata, sehingga menimbulkan dilema antara keuntungan ekonomi jangka pendek dari pertambangan dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang dari pariwisata.

4) Ironi pertambangan dan tata kelola yang lemah

Yosepha Debrina (2025) menyoroti lemahnya koordinasi zonasi antar lembaga pengelola kawasan di Raja Ampat. Eksploitasi pulau-pulau kecil oleh industri pertambangan menunjukkan bahwa pemerintah belum siap mengelola wilayah tersebut secara berkelanjutan demi pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berwawasan masa depan.

5) Perencanaan pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan

Hamsinah B. (2017) menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama dalam kerangka otonomi khusus. Hal ini bertujuan agar investasi di sektor pariwisata tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder. Metode ini dipilih agar dapat mengkaji secara mendalam

berbagai faktor yang memengaruhi permasalahan yang terjadi. Data sekunder yang digunakan berasal dari hasil penelitian terdahulu, seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, maupun dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan untuk tujuan berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Sumber-sumber tersebut bisa berupa laporan, dokumen, atau hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema penelitian sekarang (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Studi literatur merupakan proses mengkaji, menganalisis, dan menafsirkan literatur yang ada untuk memahami kerangka teori dan bukti empiris dalam suatu penelitian. Proses ini membantu peneliti dalam menemukan kekurangan atau celah dalam penelitian sebelumnya serta mendukung penyusunan pertanyaan penelitian (Creswell, 2014).

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji permasalahan kebijakan yang muncul akibat pertentangan antara pengembangan sektor pariwisata dan pertambangan di Raja Ampat dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya, seperti laporan pemerintah, jurnal ilmiah, artikel media, serta dokumen resmi. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana konflik kepentingan tersebut memengaruhi mutu pelayanan publik, kelestarian lingkungan, serta aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM, 2025) menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan tambang telah memperoleh izin operasi meskipun mendapat penolakan dari berbagai kalangan.

Laporan Greenpeace (2025) menyatakan bahwa aktivitas pertambangan ini telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan dan terumbu karang seluas lebih dari 500 hektare, yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan membahayakan kelangsungan sektor pariwisata. Dampak lingkungan yang serius tersebut tidak hanya mengancam keindahan alam, tetapi juga mengganggu mata pencaharian masyarakat adat dan pelaku pariwisata yang bergantung pada ekowisata serta perikanan berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan laut dapat menurunkan daya tarik wisatawan dan

mengurangi pendapatan dari sektor pariwisata yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Kebijakan pemerintah menjadi fokus utama dalam menangani konflik antara pembangunan pertambangan dan pelestarian pariwisata. Pemerintah pusat melalui program hilirisasi nasional mendorong investasi pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Namun, pemerintah daerah dan masyarakat lokal menuntut agar Raja Ampat tetap dijaga sebagai kawasan konservasi dan destinasi wisata utama (Kementerian Pariwisata, 2025).

Kementerian Pariwisata telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Raja Ampat, termasuk mencabut izin pertambangan yang dianggap merusak lingkungan dan mengancam sektor pariwisata (ESDM, 2025). Dialog intensif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha pariwisata terus dilakukan guna mencari solusi terbaik yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak (Kementerian Pariwisata, 2025). Namun, proses perizinan pertambangan yang kurang transparan dan minim konsultasi dengan masyarakat adat mendapat kritik tajam. Berdasarkan laporan Tempo (2025), banyak izin pertambangan yang diterbitkan tanpa kajian lingkungan yang memadai dan tanpa melibatkan masyarakat setempat secara penuh, sehingga pelayanan publik dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat masih jauh dari ideal.

Pelayanan publik di Raja Ampat tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga mencakup aspek transparansi kebijakan, perlindungan hak masyarakat adat, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Perwakilan masyarakat Papua menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak ulayat dan keterlibatan masyarakat adat sebagai bagian dari pelayanan publik yang adil dan setara (Parlementaria, 2025). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelayanan publik. Jika aspirasi masyarakat setempat diabaikan dan izin pertambangan dikeluarkan tanpa konsultasi yang memadai, pelayanan publik berpotensi menjadi alat yang lebih mengedepankan kepentingan industri dibandingkan kepentingan rakyat. Kondisi ini berisiko menimbulkan konflik sosial dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Bupati Raja Ampat menegaskan bahwa prioritas utama dalam pembangunan daerah harus diberikan kepada sektor pariwisata, bukan pada kegiatan pertambangan, karena pariwisata menyediakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan serta lebih ramah terhadap lingkungan (Antara, 2025). Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata diyakini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Para pelaku industri pariwisata dan komunitas masyarakat adat secara tegas menyatakan penolakan terhadap perluasan aktivitas pertambangan nikel, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi serta jati diri budaya Raja Ampat sebagai sebuah destinasi ekowisata (Tempo, 2025). Sikap penolakan ini mencerminkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai modal utama dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk jangka panjang.

Dalam rangka mengatasi dilema yang ada, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama secara sinergis dengan melakukan berbagai langkah strategis, seperti melakukan evaluasi kembali terhadap izin-izin pertambangan yang telah dikeluarkan, memperkuat koordinasi antar berbagai sektor terkait, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan daerah. Salah satu program yang sedang dipersiapkan adalah penetapan Raja Ampat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan investasi hijau yang mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan (Kemenpar, 2025). Selain itu, Kementerian Pariwisata terus meningkatkan intensitas kampanye pelestarian lingkungan dan pengelolaan pariwisata secara bertanggung jawab, sekaligus memastikan keselamatan dan kenyamanan para wisatawan dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas industri yang beroperasi di sekitar kawasan wisata (Kemenpar, 2025).

Gambar 1. Penambanga di Raja Ampat



Sumber: JawaPos.com

Tabel 1. Dilema Kebijakan Pariwisata dan Pertambangan di Raja Ampat

No.	Aspek	Uraian
1	Fokus Utama	Dilema antara pengembangan pariwisata berkelanjutan vs. eksploitasi tambang.
2	Dampak terhadap Pariwisata	Aktivitas tambang mengancam kelestarian alam yang menjadi daya tarik utama wisata.
3	Dampak terhadap Lingkungan	Pertambangan berpotensi merusak ekosistem laut dan hutan tropis Raja Ampat.
4	Pelayanan Publik	Pemerintah terpecah fokus antara memenuhi pelayanan dasar dan merespons konflik kebijakan sumber daya.
5	Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat diuntungkan dari pariwisata berbasis komunitas, tetapi bisa tergoda kerja cepat dari sektor tambang.
6	Kebijakan Pemerintah Daerah	Seringkali inkonsisten: satu sisi mendukung konservasi, sisi lain memberi izin eksploitasi.
7	Citra Daerah	Pariwisata membentuk citra hijau dan eksotik, tambang merusak branding global Raja Ampat.
	Respon Masyarakat Sipil	Lembaga lokal dan nasional banyak yang menolak tambang dan mendorong kelestarian.

	Tantangan Ke Depan	Mencari keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemerataan pelayanan publik
--	---------------------------	--

Sumber: hasil Penelitian (diolah Peneliti, 2025)

Diskusi

Raja Ampat adalah salah satu kawasan strategis nasional di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata berbasis ekowisata. Keindahan alamnya tidak hanya menarik wisatawan lokal dan internasional, tetapi juga menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat. Namun, keberadaan industri pertambangan di wilayah ini menimbulkan dilema serius terkait pengelolaan pelayanan publik dan kebijakan pembangunan daerah.

Idealnya, pelayanan publik berperan sebagai alat negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga, seperti penyediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan. Namun, di Raja Ampat, penerbitan izin pertambangan di kawasan konservasi dan destinasi wisata menimbulkan konflik kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Konflik ini dapat dilihat dari dua aspek utama:

1) Kepentingan Ekonomi Jangka Pendek

Pemerintah pusat dan daerah seringkali mengeluarkan izin pertambangan dengan tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah dan menciptakan lapangan kerja. Namun, aktivitas pertambangan yang bersifat ekstraktif berisiko merusak ekosistem pesisir dan laut yang rentan, yang menjadi daya tarik utama pariwisata di Raja Ampat. Dengan demikian, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai penopang utama ekonomi masyarakat terancam.

2) Inkonsistensi Tata Kelola dan Kebijakan

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan. Meskipun Raja Ampat telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan destinasi wisata unggulan, izin pertambangan tetap diterbitkan. Situasi ini memicu krisis kepercayaan publik

terhadap pemerintah dan mengganggu fokus penyediaan layanan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan (Brundtland, 1987), setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan manfaat bagi generasi mendatang. Namun, keberpihakan pada pertambangan menunjukkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan di Raja Ampat. Walaupun pertambangan memberikan keuntungan fiskal jangka pendek, kegiatan tersebut justru merusak pondasi ekonomi jangka panjang yang berbasis pada pariwisata alam.

Selain itu, teori tata kelola pemerintahan yang baik (UNDP, 1997) menegaskan bahwa pelayanan publik yang efektif harus dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan dan aspirasi penolakan mereka tidak diperhatikan, maka prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini diabaikan. Akibatnya, selain kerusakan lingkungan, kualitas layanan publik seperti infrastruktur pendukung pariwisata, penyediaan air bersih, dan pendidikan lingkungan juga menurun.

Dari sudut pandang sosial, kehadiran pertambangan di Raja Ampat menimbulkan ketegangan baik secara horizontal maupun vertikal. Masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada laut dan ekowisata merasa kehilangan ruang hidup, sehingga terjadi konflik kepentingan antara kelompok pendukung pertambangan dan pendukung pariwisata, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Surya Radhit (2025).

Jika pemerintah tidak segera menetapkan batasan yang jelas antara wilayah pertambangan dan kawasan konservasi pariwisata serta tidak meningkatkan kapasitas pelayanan publik yang berorientasi pada keberlanjutan, Raja Ampat berisiko kehilangan statusnya sebagai ikon pariwisata dunia. Hal ini akan menjadi preseden negatif bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Raja Ampat sedang mengalami konflik yang cukup serius antara kepentingan ekonomi jangka pendek yang diwakili oleh aktivitas pertambangan nikel dan upaya menjaga keberlanjutan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis konservasi lingkungan. Walaupun sektor pariwisata telah terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, tekanan dari industri pertambangan tetap tinggi, terutama karena adanya kebijakan hilirisasi nasional yang mendorong investasi di sektor tersebut.

Kurangnya transparansi dalam proses perizinan, minimnya keterlibatan masyarakat adat, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal selama proses tersebut, telah menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik dan memicu timbulnya konflik sosial di masyarakat. Penolakan yang kuat dan konsisten dari masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ini mencerminkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem sebagai modal utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah, seperti pencabutan izin pertambangan yang bermasalah, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah, serta inisiatif untuk menetapkan Raja Ampat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menitikberatkan pada pengembangan pariwisata hijau, merupakan langkah-langkah positif yang perlu terus diperkuat dan dikembangkan. Keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan pelayanan publik yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat serta pelestarian lingkungan sebagai fondasi utama dalam pembangunan tersebut.

Daftar Pustaka

Ahmad Sholikin. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 13 No 2 (2021), 170–170.

- Antara News. (2025, Juni 12). Bupati Raja Ampat Sebut Pariwisata Prioritas Pembangunan Bukan Pertambangan.
- Debrina, Y. (2025). Ironi penambangan Raja Ampat: Bukti ketidaksiapan pemerintah kelola pulau-pulau kecil. Kompas.id.
- Governance for Sustainable Human Development. United Nations Development Programme.
- Greenpeace. (2025). Laporan Dampak Pertambangan Nikel di Raja Ampat.
- Hamsinah, B. (2017). Strategi perencanaan dan pengembangan pariwisata di Papua Barat berbasis masyarakat. *Jurnal Inovasi*, 14(2), 45–55.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19
- Jogoena, A. B. (2025). Ketidakselarasan kebijakan tambang di Raja Ampat. Kompasiana.
- Mongabay Indonesia. (2023). Raja Ampat Terancam Tambang Nikel, Masyarakat Adat dan Aktivis Lingkungan Bergerak. Diakses dari: <https://www.mongabay.co.id/2023/09/14/raja-ampat-terancam-tambang-nikel/>
- Katingka, N. (2025). RIPPADA Raja Ampat: Ketegangan antara pariwisata dan tambang. Scribd.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2024). Data Keanekaragaman Hayati Laut Raja Ampat.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2022). *Raja Ampat dalam Peta Destinasi Prioritas Ekowisata Nasional*. Diakses dari: <https://www.kemenparekraf.go.id/>
- Kementerian Pariwisata (Kemenpar). (2025). Tiga Langkah Strategis Kementerian Pariwisata Tangani Isu Tambang Nikel di Raja Ampat.
- Parlementaria. (2025, Juni 10). Pertambangan di Raja Ampat Harus Dikaji Ulang, Jangan Ganggu Pariwisata dan Warga. DPR RI eMedia.
- Radhit, S. (2025). Tambang Raja Ampat: Dilema ekonomi dan pentingnya manajemen SDA berkelanjutan
- Tempo.co. (2025, Juni 7). Ramai Tambang Nikel Raja Ampat, Kemenpar Lakukan Tiga Langkah Ini.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.